

IMPLEMENTASI GENDER RESPONSIVE BUDGETING (GRB) (STUDI KASUS DI LIMA NEGARA)

Annisa Mardhiyah Rahmadani¹⁾, Muchtadi Darmawan²⁾, Wawanudin¹⁾

Annisa Mardhiyah Rahmadani (AnnisaMardhiyahRamadhani_1406617052@mhs.unj.ac.id)

Muchtadi Darmawan (Mochtadidarmawan_1406617082@mhs.unj.ac.id)

Wawanudin (wan.edu16@gmail.com)

ABSTRAK

Angaran Responsif Gender (ARG) atau *Gender Responsive Budgeting (GRB)* merupakan instrumen yang menghubungkan kebijakan fiskal pemerintah dengan hasil kesetaraan gender dalam pembangunan, melalui pemenuhan hak dan manfaat pembangunan pada semua kelompok masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, disabilitas maupun kelompok rentan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik baik implementasi GRB dan pencapaiannya melalui GRB di lima negara yakni Malaysia, Nepal, India, Filipina, dan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dari literatur yang terkait dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan praktik implementasi GRB di 5 negara sangat bervariasi. Di Penang Malaysia, praktik dilakukan melalui pelibatan warga dalam proses perencanaan dan penganggaran, pelibatan tersebut menghasilkan berupa pembangunan dua komplek apartemen berbiaya rendah yang diperuntukkan bagi masyarakat. Di Kerala India praktik GRB telah menghasilkan program pengentasan kemiskinan bagi perempuan melalui implementasi *Kudumbashree* (bank informal) untuk masyarakat miskin. Di Nepal, praktik GRB dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan ranah publik lainnya. Sementara di Indonesia praktik GRB dilakukan melalui pendekatan sistem Perencanaan dan Penganggaran yang berlaku sebagai alat untuk mengintegrasikan gender dalam pembangunan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan memberikan dampak penting pada peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di tingkat nasional dan daerah. Studi ini merekomendasikan, 1) diperlukannya sistem yang integratif dan birokrasi yang efektif agar pengalokasian anggaran untuk program pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan gender dapat diimplementasikan secara lebih optimal 2) memperkuat jaringan dan koordinasi pada seluruh tingkatan pemerintah dalam pelaksanaan GRB. 3) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait GRB khususnya tentang efektivitas penggunaan GRB dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan dan pengembangan instrumen GRB di berbagai negara.

Kata Kunci: : Kesetaraan, Gender, Anggaran gender, GRB, PPRG

ABSTRACT

*Gender Responsive Budgeting (GRB) was an instrument that connects the government's fiscal policy with the results of gender equality in development, through the fulfillment of development rights and benefits in all community groups, both men and women, disabilities and other vulnerable groups. This research aims to analyze the implementation of GRB and its achievements through GRB in five countries; Malaysia, Nepal, India, philippines, and Indonesia. The research method used qualitative with the approach of literature study from literature related to research objectives. The results showed that GRB implementation practices in 5 countries vary widely. In Penang Malaysia, the practice is carried out through the involvement of citizens in the planning and budgeting process, the involvement resulted in the construction of two low-cost apartment complexes intended for the community. In Kerala India the practice of GRB has produced poverty alleviation programs for women through the implementation of *Kudumbashree* (informal banks) for the poor. In Nepal, GRB practices are carried out by increasing women's involvement in decision-making processes and other public spheres. While in Indonesia GRB practice is carried out through a Planning and Budgeting system approach that applies as a tool to integrate gender in development. With this approach, it is expected to have an important impact on increasing the Gender Empowerment Index (IDG) and Gender Development Index (IPG) at the national and regional levels. This study recommends, 1) the need for an integrative and effective bureaucratic system so that budget allocation for empowerment, equality and gender justice programs can be implemented properly 2) network and coordination at all levels of government in the implementation of GRB. 3) further research is needed related to GRB, especially on the effectiveness of the use of GRB in the planning and budgeting of GRB development and development in various countries.*

Key Word : Equality, Gender, Gender Budget, GRB, PPRG

PENDAHULUAN

Salah satu bidang penting dari kebijakan pemerintah adalah anggaran. Anggaran adalah alat kebijakan ekonomi terpenting pemerintah untuk mencerminkan prioritas sosio-ekonomi sektor publik. Anggaran pemerintah mencerminkan prioritas terhadap pengeluaran dan keputusan peningkatan pendapatan. Menurut Gita Sen (Sen, 2000) GRB (*Gender Responsive Budgeting*) adalah pendekatan penyediaan alat analisis untuk integrasi gender perspektif ke dalam anggaran pemerintah (dengan penekanan pada pengeluaran publik) untuk mengalokasikan sumber daya pemerintah dalam sebuah cara yang adil untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam masyarakat untuk mencapai tujuan kesetaraan gender.

Kebijakan dan anggaran pembangunan seringkali tidak memperhitungkan perbedaan dampak kepada perempuan dan laki-laki secara sistematis. Strategi GRB menanggapi kekurang efektifnya anggaran (netral) terhadap kelompok tertentu menjadi equity (berkeadilan) bagi semua kelompok. Analisis dampak gender dari pengeluaran pemerintah bertujuan untuk mempromosikan tindakan untuk mengubah kebijakan dan prioritas anggaran sejalan dengan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Para ekonom feminis mempertanyakan netralitas makro ekonomi, termasuk dampak anggaran pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Contohnya adalah *Women's Budget Group* dibentuk pada tahun 1989 di Inggris Raya, beranggotakan feminis dan perwakilan dari masyarakat sipil dan serikat pekerja untuk mengkomentari dan mengajak pemerintah tentang masalah anggaran. Selanjutnya di Afrika Selatan yang diprakarsai oleh *the South Africa Women's Budget* pada tahun 1995 yang merupakan hasil dari demokrasi pemilihan pertama di negara tersebut. Pada tahun yang sama, *Beijing Platform for Action* yang meminta pemerintah untuk secara sistematis meninjau bagaimana perempuan mendapatkan keuntungan dari pengeluaran publik pemerintah, dan juga berperan dalam mempercepat GRB di seluruh dunia.

GRB membantu pemerintah memahami bagaimana mereka menetapkan prioritas dan mengalokasikannya kembali terhadap sumber daya tersebut, untuk memenuhi komitmen mereka dalam mencapai kesetaraan gender dan memajukan hak-hak perempuan - termasuk yang diatur dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), dan *Beijing Platform for Action* dan *Sustainable Development Goals*. Anggaran yang dikeluarkan menjadi sangat penting agar alokasi dana untuk pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender menjadi kenyataan konkret.

Melakukan analisis anggaran responsif gender dapat dilihat sebagai langkah tidak hanya menuju akuntabilitas hak-hak perempuan, tetapi juga menuju transparansi publik dan efisiensi ekonomi yang lebih besar. Dengan bukti kuat bahwa ketidaksetaraan gender menimbulkan biaya ekonomi dan pembangunan manusia yang sangat besar. Dengan mengubah kebijakan fiskal melalui

pendekatan GRB akan menutup kesenjangan dan menghasilkan keuntungan bagi semua kelompok masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang praktik baik implemenatai GRB dan pencapaiannya di lima Negara, antara lain; Penang-Malaysia, Nepal, India, Malaybay-Filipina, dan Indonesia

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, merupakan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) Strauss dan Corbin (dalam Nawawi, 2012). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengkajian pustaka (*desk study*) dilakukan dengan cara pengumpulan data dan informasi melalui sumber-sumber yang tersedia di publik (data sekunder) seperti buku, surat kabar, majalah, laporan riset, jurnal, data statistik, putusan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan kemudian dilakukan penelaahan. Penelaahan kepustakaan termasuk memperoleh ide tentang masalah apa yang paling *up to date* untuk dirumuskan dalam penelitian (Nazir, 2009). Data-data yang terkumpul kemudian ditelaah sehingga menghasilkan gambaran mengenai implementasi dan pencapaian pembangunan melalui *Gender Budget Statement* di lima negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan penting pelembagaan GRB adalah untuk mengintegrasikan proses dan alat GRB ke dalam tugas dan fungsi sebagai bagian dari pengarusutamaan gender dengan proses pelembagaan. Selain itu juga sebagai salah alat transparansi anggaran yang efektif dan akuntabel. Penelitian ini memberikan gambaran ringkas tentang praktik implementasi GRB di lima negara yaitu; Penang-Malaysia, Nepal, India, Malaybay - Filipina, dan Indonesia.

Penang, Malaysia

Dalam hal kedudukan warga negara, Malaysia memiliki landasan yang tertuang dalam Pasal 8, Pelembagaan Persekutuan Bagian II tentang Kesamarataan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara semata-mata atas alasan agama, keturunan, tempat lahir. Landasan ini berlaku bagi semua negara bagian Malaysia untuk melaksanakan proses kebijakannya agar terwujudnya keadilan bagi seluruh warga negaranya.

Salah satu Negara Bagian Malaysia adalah Pulau Pinang atau yang biasa disebut dengan Penang yang terletak di Pantai Barat Semenanjung Malaysia. Sharizan (Kamarudin, 2016:55) mengatakan

bahwa Penang adalah negara bagian yang pertama kali mengimplementasikan *gender responsive Budgeting* (GRB) di Malaysia. Hal itu diawali pada tahun 2008, Kepala Menteri Penang yang baru berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan sosial yang akhirnya memunculkan pendirian *Penang Women's Development Corporation* (PWDC) pada tahun 2011 (Kamarudin, 2020). Visi PWDC adalah untuk mengarusutamakan gender ke dalam kebijakan dan semua sektor program untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan sosial di negara bagian Penang. Pada tahun 2012 PWDC bermitra pada dua dewan lokal, yaitu Dewan Kota Pulau Penang dan Dewan Kota Seberang Perai untuk melaksanakan GRB di Penang. Nama GRB kemudian secara resmi diubah menjadi *Gender Responsive and Participatory Budgeting* (GRPB) pada tahun 2014 untuk mencerminkan penekanan dan pentingnya dua pendekatan *Gender Responsive Budgeting* (GRB) dan *Participatory Budgeting* (PB).

Penang memiliki Visi Penang 2030. Visi ini bertujuan untuk menjadikan Pulau Pinang sebuah negeri yang mementingkan kebahagiaan kekeluargaan, sebuah negeri hijau dan pintar dan akan menjadi inspirasi ke seluruh negara menjelang tahun 2030 (Malek, 2020:9). Dalam mewujudkan visi ini, *Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang* (MMK) atau Dewan Eksekutif negara Bagian Penang menciptakan Keterangan Gender pada tahun 2019 sebagai dasar untuk mencapai kesetaraan gender tanpa membedakan suku, agama dan status sosial ekonomi. Keterangan Gender ini berlandaskan pada Pasal 8, Pelembagaan Persekutuan Bagian II tentang Kesamarataan. Hal ini untuk memastikan segala kebijakan, prosedur, dan penegakan hukum akan dibuat secara komprehensif dan menekankan perspektif gender (Dasar Keterangan Gender Kerajaan Negeri Pulau Pinang, 2019: 3).

Selaras dengan visi Penang 2030, Dasar Keterangan Gender memberi keutamaan untuk mengurangi diskriminasi, ketidaksetaraan, dan mengalakkan partisipasi di berbagai pihak. Istilah 'Keterangan' memiliki arti penerimaan dan penghormatan tentang keragaman kebutuhan individu dalam komunitas yang adil dan seimbang. KG adalah kekuatan pendorong untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan sosial sehingga hak asasi manusia dapat dirasakan oleh masyarakat dari berbagai jenis kelamin, suku dan bahkan latar belakang.

Terdapat 6 (enam) Strategi dalam pelaksanaan Dasar Keterangan Gender, yaitu: 1) Latihan dan Pendidikan Secara Berkelanjutan Bagi Keterangan Gender. Memberikan pelatihan untuk semua departemen dan lembaga pemerintah negara bagian memastikan semua anggota memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan konsep KG. 2) Pengumpulan *Sex-Disaggregated Data* (SDD). SDD perlu dikumpulkan secara sistematis dan dianalisis untuk melihat dampaknya terhadap kebijakan ada. SDD merupakan data untuk menunjukkan perbedaan kondisi wanita dan anak laki-laki, serta anak perempuan dan anak laki-laki. 3) Memastikan keseimbangan gender di semua Jabatan dan Agensi Kerajaan Negeri. Memastikan kesempatan yang sama diberikan untuk semua pria dan wanita di tahap pengambilan keputusan dan

implementasi di Negara Bagian Penang dengan rasio 40% pria, 40% wanita, dan 20% terbuka baik pria maupun wanita yang berkualitas. 4). Pelaksanaan GRPB sepenuhnya di peringkat Kerajaan Negeri. DKG akan memastikan pengimplementasian GRPB sepenuhnya secara sistematis oleh departemen dan lembaga pemerintah negara bagian di Pulau Pinang. 5) Konsultasi Strategis dan Mitra dengan berbagai Instansi Pemerintah, Sektor Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan Tinggi dan Masyarakat. Untuk mendapatkan komitmen dari publik dan sektor swasta dalam melaksanakan program-program berdasarkan KG. 6) Pemantauan dan Penilaian., terdapat umpan balik dalam penilaian efektivitas program sebagai hasil dari monitoring dan mengevaluasi implementasi kebijakan untuk digunakan sebagai masukan perbaikan perencanaan program dan pembentukan kebijakan selanjutnya.

Dasar Keutamaan Gender merupakan Kebijakan untuk memastikan akses inklusif ke perencanaan program, pelaksanaan dan penyediaan fasilitas untuk mencapai kesetaraan gender. Pemerintah Negara Bagian harus berkomitmen untuk mengadopsi prinsip inklusi dan GRPB dalam semua aspek tata kelola, termasuk perencanaan program, desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi proses oleh departemen dan lembaga pemerintah negara bagian.

Nepal

Nepal merupakan salah satu negara di bagian Asia Selatan yang menerapkan kebijakan yang inklusif dan mendukung kesetaraan gender. Di Nepal, GRB dilembagakan langsung ke dalam anggaran nasional. Dalam rangka reformasi keseluruhan dalam proses anggaran, Nepal telah mengadopsi *Gender Resposive Budgeting* (GRB) untuk memenuhi persyaratan konstitusional dan komitmen kesetaraan gender internasionalnya (Cecelia, 2016:165). GRB diperkenalkan dalam konteks upaya Pemerintah untuk reformasi anggaran yang meliputi: penguatan sistem manajemen keuangan publik, pembentukan kerangka pengeluaran jangka menengah, dan bergerak menuju penganggaran berbasis kinerja.

Proses penerapan sistem GRB diawali pada Rencana Kesepuluh tahun 2002-2007. Pemerintah Nepal telah berfokus pada pemberdayaan perempuan, penguatan kesetaraan gender, perumusan kebijakan pengarusutamaan gender (Cecelia, 2016:165). Untuk mendukung rencana tersebut kementerian keuangan membentuk *Gender Responsive Budgeting Committee* (GRBC) pada tahun 2005. Komite tersebut dibentuk sebagai badan permanen di dalam kementerian untuk merancang sistem GRB yang dapat diterapkan di tingkat sektoral, untuk memantau alokasi anggaran dan pengeluaran publik dari perspektif gender dan akhirnya untuk menilai dampak kebijakan pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki (Hesselbarth, 2007:2).

Setelah itu, konstitusi sementara tahun 2007-2010, Nepal telah berfokus pada kebijakan yang mendorong pembangunan melalui proses ekonomi, sosial dan politik untuk memastikan pembangunan yang inklusif. Lalu, dilanjutkan pada Rencana Tiga Tahun (2010-2013) tentang

pengaturan pelembagaan GRB di tingkat pusat dan untuk mereplikasinya dalam perencanaan, pemrograman, penganggaran dan pemantauan daerah. Dalam mewujudkan perencanaan ini, Pemerintah Nepal mengadopsi *Gender Equality and Social Inclusion* (GESI) sebagai dasar untuk perencanaan, pemrograman, pemantauan, dan evaluasi (Katie McNamara, 2018:3). Adapun proses pelaksanaan GESI, yaitu: 1) Mengidentifikasi kelompok perempuan tertentu: miskin, tersisih dan rentan dan mereka yang kesulitas dalam mengakses layanan 2) Merancang kebijakan atau program 3) Pengimplementasian, dan 4) Monitoring dan evaluasi.

Dengan adanya pelembagaan GRB, Nepal berkomitmen untuk membuat sistem pemerintahan dan pengarusutamaan gender yang terdesentralisasi menjadi salah satu tujuan kebijakan utama. Pemerintah mengamanatkan minimal 33% keterwakilan perempuan di semua tingkatan melalui RUU di parlemen. Persyaratan tambahan untuk pelembagaan GRB yang berhasil di seluruh Nepal adalah dengan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam perencanaan.

India

Penganggaran gender diintegrasikan oleh Pemerintah India, baik melalui program yang ditargetkan secara khusus untuk perempuan atau mengalokasikan komponen fiskal bagi pemberdayaan perempuan. Hal ini dapat dipahami sebagai perspektif dalam proses penganggaran untuk tahap perencanaan, perumusan dan implementasi. Menurut Debbie (Budlender, 2004) *Gender Responsive Budgeting* (GRB) diadopsi di India pada tahun 2000. Hal itu berlandaskan pada Rencana Kesembilan (1997-2002) dengan memastikan bahwa perempuan menerima bagian yang berhak dari sumber daya publik. Sebagai inovasi fiskal, penganggaran gender telah mengalami empat fase di India: jaringan pengetahuan dan pembangunan model; mekanisme kelembagaan; pengembangan kapasitas; dan mekanisme akuntansi (Rudra, 2018).

Pada tahun 2004, GRB resmi dilembagakan oleh Kementerian Keuangan yang selanjutnya diadopsi oleh Kementerian Perempuan dan Perkembangan Anak (UNESCAP:2018). Langkah selanjutnya dalam hal pelembagaan proses penganggaran gender adalah untuk mempersiapkan analisis 'ex-post' dari Anggaran Serikat dan kapan parlemen reses setelah presentasi anggaran. Tujuannya adalah agar laporan pada proses penganggaran jelas. Di India, setelah presentasi anggaran parlemen masuk ke reses. Setelah reses ditentukan, parlemen mulai memberikan suara. Analisis tersebut menghitung alokasi gender ke dalam program-program yang ditargetkan secara khusus untuk perempuan, belanja publik dengan alokasi pro-prempuan dan dampak pengeluaran pengarusutamaan gender dengan jenis kelamin (Chakraborty, 2013). Setelah itu, pada tahun 2001 diadakan Konferensi Regional Asia Selatan tentang anggaran gender di Kathmandu agar mencapai konsensus untuk memperdalam proses di tingkat provinsi dan juga penganggaran inisiatif gender NIPFP (*National Institute of Public Finance and Policy*) yang memiliki bagian

untuk menganalisis kelanjutan *ex-post* hingga 2005/2006. Sejak tahun 2005/2006, Kementerian Keuangan telah mengoordinasikan penganggaran gender sesuai dengan pernyataan *ex-post*.

Untuk pengalokasian GRB di India, dilakukan melalui metodologi *ex-post* dan *ex-ante*. metodologi *ex-post* berfokus pada anggaran yang ada di tingkat nasional dan sub nasional. Analisis perspektif gender dilakukan untuk memeriksa hasil efektifitas anggaran. metodologi *ex-post* memiliki dua komponen: intensitas gender dari input fiskal, dan efektivitas pengeluaran publik melalui analisis kejadian manfaat atau pemeriksaan proses pengeluaran. Analitik Matriks untuk mengkategorikan pengeluaran publik melalui perspektif gender diidentifikasi sebagai berikut: 1) Pengeluaran yang ditargetkan secara khusus untuk wanita dan anak perempuan; 2) Alokasi pro-perempuan, yaitu skema pengeluaran gabungan dengan komponen wanita yang signifikan; dan 3) Sisa Pengeluaran publik bedasarkan jenis kelamin.

Proses pelembagaan gender dalam perencanaan, penganggaran, dan praktik audit dilakukan melalui kegiatan peningkatan kapasitas pejabat pelaksana. Sejak tahun 2006 hingga sekarang dilakukan peningkatan kapasitas untuk pejabat dan memperkuat pekerjaan Gender *Budgeting Cell* (GBC) di kementerian sektoral dan departemen lainnya. Di India Konsultan (tenaga ahli dari masyarakat) GRB ditempatkan di Kementerian Perempuan dan Perkembangan Anak untuk membantu memberikan dukungan terhadap implementasi GRB terutama dalam melakukan pelatihan bagi pejabat dan membantu penyusunan dokumen pernyataan anggaran gender di lintas sektor.

Malaybay, Filipina

Pemerintah nasional Filipina mengembangkan *Community-Based Monitoring System* (CBMS) pada awal 1990-an untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi sumber dayanya. CBMS adalah alat survei yang dirancang untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk memantau dampak dari berbagai program kebijakan pemerintah, khususnya di kalangan masyarakat yang terpinggirkan. Pada 2007, Pemerintah Kota Malaybalay, sebagai unit pemerintah daerah, terpacu menggunakan CBMS. Namun, beberapa departemen pemerintah kota. menemukan bahwa hal tersebut tidak membahas beberapa permasalahan mereka. Dengan demikian, pada kuartal terakhir tahun 2007, Sistem Survei Terpadu Malaybalay atau *Malaybalay Integrated Survey System* (MISS) dikonseptualisasikan dengan menambahkan pertanyaan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan peredaran departemen di unit pemerintahan kota. Pertanyaan survei menyangkut layanan atau manfaat yang diterima dari pemerintah kota.

Menurut Herculano (Ronolo, 2016) MISS bisa menjadi alat advokasi untuk layanan pemerintah. Bagi Malaybalay, MISS membuka jalan bagi penganggaran responsif gender. Analisis data MISS menyediakan data kepada pemerintah untuk orang-orang yang belum terjangkau oleh layanannya. Misalnya data menunjukkan bahwa lebih banyak perempuan yang menganggur

karena mereka mengurus anak-anak kecil di rumah dan lebih banyak remaja laki-laki tidak sekolah menengah karena mereka sudah bekerja. Informasi ini disajikan dengan jelas isu gender yang perlu dipertimbangkan dalam penganggaran responsif gender.

Tahapan dalam pengimplementasian MISS: 1) Memastikan kebutuhan informasi departemen. Kegiatan pertama yang dilakukan untuk MISS adalah memperoleh informasi departemen yang sudah didapatkan dari CBMS. 2) Pelatihan pencacahan untuk BHW (Barangay Health Workers) untuk mengimplementasikannya. Pelatihan bertujuan untuk simulasi pencacahan dan menguji kuesioner. 3) Pengumpulan data dan pengembangan computer perangkat lunak. Setelah survei dilakukan, pemrogram internal secara bersamaan mengembangkan perangkat lunak komputer untuk menangkap dan memproses informasi yang dikumpulkan. 4) Pelatihan dan pengkodean Literasi computer. Hal ini untuk meminimalkan kesalahan pemasukan data. 5) Menyajikan hasil olahan data. Setelah pengkodean, membantu BHW akan dilakukan penyajian hasil survei dan mempersiapkannya untuk dipresentasikan ke Dewan Barangay. 6) Menyajikan dan memvalidasi laporan. Para BHW kemudian mempresentasikan hasilnya kepada pejabat Barangay untuk mengkonfirmasi validasi lebih lanjut. 7) Perencanaan. Pada tahap perencanaan, departemen dan pemerintah kota meninjau, menganalisis program, dan kegiatan yang ada. 8) Alokasi sumber daya. Pada tahap alokasi sumber daya, usulan program dan kegiatan yang menangani masalah gender (laki-laki dan perempuan) dan pembangunan. Hasil dari siklus MISS berikutnya akan memberikan gambaran kepada pemerintah kota tentang dampak program dan lebih khusus lagi untuk mengidentifikasi bagaimana uang yang dialokasikan digunakan agar dapat memperbaiki keadaan masyarakat dan berdampak positif pada masalah gender, selain itu memberikan gambaran kepada pemerintah kota tentang dampak program dan proyek yang telah dilaksanakan.

Indonesia

Sejak tahun 2009, Indonesia telah melembagakan *Gender Responsif Budget* (GRB) di tingkat nasional dan daerah, yang dikenal sebagai Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Melalui Instruksi Presiden Nomor 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, pengarusutamaan gender menjadi salah satu fondasi operasional untuk melaksanakan agenda pembangunan nasional. Oleh karenanya, prinsip-prinsip pengarusutamaan gender menjadi cerminan dalam kebijakan pembangunan. Integrasi gender dalam perencanaan dan penganggaran. Dengan diintegrasikannya GRB ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran, maka pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Jangka (RPJMN) 2004-2009 GRB mulai diterapkan dalam dokumen tersebut. Berbagai kementerian, lembaga dan pemangku kepentingan terkait kemudian diminta untuk menyusun kebijakan, indikator, dan target berbasis gender

Pelaksanaan rencana PPRG dimulai dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor KEP. 30/M.PPN/HK/03/2009

tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Pasca lokakarya nasional yang dilaksanakan tahun 2009, muncul tiga Kementerian sebagai penggerak utama pelaksanaan PPRG di tingkat pusat: Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA). Dengan demikian, kebijakan pengarusutamaan gender dimasukkan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran sebagai GRB pada tahun 2010. Pada tahun 2012, keempat kementerian penggerak GRB ini mengeluarkan Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender melalui GRPB untuk mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender yang selaras dengan RPJMN 2010 - 2014 untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk memenuhi tujuan Millenium Development Goals (MDGs). Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam siklus pembangunan terorganisir dengan lebih baik, sistematis dan terkoordinasi di tingkat nasional dan daerah.

Untuk mempercepat pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di provinsi dan kabupaten/kota, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peranan strategis dalam pelaksanaan PPRG, dimana Kemendagri menetapkan regulasi yang memandatkan kepada pemerintah daerah membentuk Satuan Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan Focal Point. Pimpinan daerah melalui SK Gubernur/ Bupati/Walikota akan membentuk Pokja PUG dan menugaskan Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memimpinnya. Kepala SKPD yang menangani isu-isu pemberdayaan perempuan menjadi Sekretaris Pokja PUG, dan Kepala lain dari SKPD yang menjadi anggota.

KemenPPPA sebagai fasilitator utama bersama dengan PATTIRO dan The Asia Foundation mempromosikan GRPB melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan ke berbagai daerah di Indonesia didukung dengan Modul Pelatihan Penganggaran Responsif Gender (Sundari, dkk.,2006). Implementasi GRPB di Indonesia dilakukan secara serentak di tingkat nasional dan daerah serta dilaksanakan di lingkungan pemerintah atau oleh masyarakat sipil.

Tabel 1. Implementasi *Gender Budget Statement* dan Pencapaiannya di Lima Negara

N o	Negara	Regulasi/ Kebijakan	Lead Sector	Proses	Pelaksanaan	Pencapaian
1	Penang, Malaysia	▪ Landasan Pasal 8, Pelembagaan Persekutuan Bagian II tentang Kesamarataan Kebijakan Keterangkuman Gender pada tahun 2019	<i>Penang Women's Development Corporation</i> (PWDC) bermitra dengan Dewan Kota Pulau Penang dan Dewan Kota Seberang	1. Terdapat landasan kedudukan warga negara yang tertuang dalam Pasal 8, Pelembagaan Persekutuan Bagian II tentang Kesamarataan 2. Pada tahun 2008 pemerintah Kepala Menteri Penang yang baru berkomitmen untuk mewujudkan	1. Latihan dan Pendidikan Secara Berkelanjutan Bagi Keterangkuman Gender 2. Pengumpulan Sex- Disaggregated Data (SDD) 3. Memastikan keseimbangan gender di semua	Diciptakannya kebijakan Keterangkuman Gender dalam perencanaan program, pelaksanaan dan penyediaan fasilitas untuk mencapai kesetaraan gender.

				<p>kesetaraan gender dan keadilan sosial.</p> <p>3. Pada tahun 2011 didirikannya <i>Penang Women's Development Corporation</i> (PWDC) untuk mengarusutamakan gender ke dalam kebijakan dan semua sektor program</p> <p>4. Pada tahun 2012 PWDC bermitra pada dua dewan lokal, yaitu Dewan Kota Pulau Penang dan Dewan Kota Seberang Perai untuk melaksanakan GRB di Penang.</p> <p>5. Nama GRB kemudian secara resmi diubah menjadi <i>Gender Responsive and Participatory Budgeting</i> (GRPB) pada tahun 2014</p> <p>Pada tahun 2019 dibuatkan kebijakan Keterangkuman Gender untuk mencapai kesetaraan gender</p>	<p>Jabatan dan Agensi Kerajaan Negeri</p> <p>4. Pelaksanaan GRPB sepenuhnya di tingkatan Kerajaan Negeri</p> <p>5. Konsultasi dan Mitra strategis dengan berbagai Agensi Kerajaan, Sektor Swasta, Pertubuhan Bukan Kerajaan, Institusi Pengajian Tinggi dan komunitas</p> <p>6. Pemantauan dan Penilaian</p>	
2	Nepal	Rencana Kesepuluh tahun 2002-2007	Kementerian Keuangan dan <i>Gender Responsive Budgeting Committee</i> (GRBC)	<p>1. Diawali pada Rencana Kesepuluh tahun 2002-2007 perumusan kebijakan pengarusutamaan gender</p> <p>2. Setelah itu, konstitusi sementara tahun 2007-2010, Nepal telah berfokus pada kebijakan yang inklusif</p> <p>Dilanjutkan pada Rencana 3 Tahun (2010-2013) tentang pengaturan pelembagaan GRB mengadopsi di tingkat pusat dan mengadposi</p>	<p>1. Mengidentifikasi kelompok perempuan tertentu : miskin, tersisih dan rentan dan mereka yang kesulitas dalam mengakses layanan</p> <p>2. Merancang kebijakan atau program</p> <p>3. Pengimplementasi an</p> <p>Monitoring dan evaluasi</p>	<p>Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan.</p>

Gender Equality and Social Inclusion (GESI)						
3	India	Kementerian Perempuan dan Perkembangan Anak	Rencana Kesembilan (1997-2002)	<p>1. Pada tahun 2001 diadakan Konferensi Regional Asia Selatan tentang anggaran gender di Kathmandu agar mencapai konsensus untuk memperdalam proses di tingkat provinsi dan juga penganggaran inisiatif gender.</p> <p>2. NIPFP (<i>National Institute of Public Finance and Policy</i>) Memiliki bagian untuk menganalisis kelanjutan <i>ex-post</i> hingga 2005/06. Sejak 2005/06, Kementerian Keuangan telah mengoordinasikan penganggaran gender sesuai dengan pernyataan <i>ex-post</i>.</p> <p>Pada tahun 2004, GRB resmi dilembagakan oleh Kementerian Keuangan yang selanjutnya diadopsi oleh Kementerian Perempuan dan Perkembangan Anak</p>	<p>Membuat Analitik Matriks untuk mengkategorikan Pengeluaran publik melalui perspektif gender yang diidentifikasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengeluaran yang ditargetkan secara khusus untuk wanita dan anak perempuan; 2. Alokasi pro-perempuan, yaitu skema pengeluaran gabungan dengan komponen wanita yang signifikan; dan <p>Sisa Pengeluaran publik bedasarkan jenis kelamin</p>	<p>Terdapat kebijakan anggaran pengarusutamaan gender di semua tingkat pemerintahan.</p>
4	Filipina	Kebijakan Penerapan <i>Malaybalay Integrated Survey System</i> (MISS)	Pemerintah Kota Malaybay	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan kebutuhan informasi departemen 2. Pelatihan pencacahan untuk BHW (Barangay Health Workers)- untuk mengimplementasikannya 3. Pengumpulan data dan pengembangan komputer perangkat lunak 4. Pelatihan dan pengkodean Literasi komputer 5. Menyajikan hasil olahan data 6. Menyajikan dan memvalidasi laporan 7. Melakukan Perencanaan dan 	MISS digunakan untuk mengidentifikasi program, proyek dan kegiatan alokasi anggaran gender dan pembangunan	Pengusulan program dan kegiatan yang akan didanai.

				Pembangunan 8. Alokasi sumber daya Monitoring dan Evaluasi		
5	Indonesia	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG. Peraturan dan kebijakan tentang GRPB/PPRG	Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peraturan teknis tentang implementasi PUG dan PPRG 2. Membentuk dan memperkuat kelembagaan Tim Driver dan Focal Point di Kementerian /lembaga/ daerah 3. Melakukan Peningkatan kasitas kepada aparatur dan masyarakat tentang PUG dan GRPB/PPRG 4. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi serta penilaian terhadap pelaksanaan dan pencapaian PPRG dan PUG di tingkat Kementerian /lembaga/ daerah. 	GRPB/PPRG telah digunakan sebagai instrumen yang terintegrasikan dan menjadi arus utama dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah.	GRPB berkontibusi penting pada pencapaian dan peningkatan IDG dan IPG nasional dan daerah.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini memberikan simpulan bahwa terdapat perbedaan atau keragaman penerapan anggaran responsif gender di berbagai negara. Malaysia menerapkan partisipasi perencanaan dan pembangunan dalam seluruh lapisan masyarakat, Nepal menerapkan wajib alokasi anggaran untuk perempuan. India menerapkan sistem desentralisasi dalam pemberdayaan perempuan. Filipina menggunakan alat survei untuk mengetahui pengalokasian dana untuk kebutuhan perempuan dan laki-laki, dan di Indonesia menerapkan kebijakan PPRG/GRPB pada pemerintah tingkat pusat hingga daerah. Semua negara di atas memiliki persamaan tujuan dapat mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan perempuan dan laki-laki untuk pembangunan yang inklusif. Pencapaian pembangunan melalui GRB telah menujukan keberhasilan yang sangat positif, misalnya di Kerala India telah menghasilkan program pengentasan kemiskinan perempuan melalui implementasi *Kudumbashree* atau bank informal untuk masyarakat miskin. Di Nepal, keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan ranah publik lainnya secara meningkat, dan di Indonesia GRPB telah menjadi pengarusutamaan dalam perencanaan dan penganggaran di semua sektor dan disemua tingkatan

baik pusat hingga daerah, bahkan hingga desa. Implementasi GRPB telah memberikan dampak penting pada peningkatan IDG dan IPG nasional dan daerah.

Rekomendasi yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini; 1). Pemerintah perlu memaksimalkan sistem yang integratif dalam penerapan GRB. Dalam proses penerapan anggaran responif gender, diperlukannya sistem yang integratif dan birokrasi yang tidak berbelit agar pengalokasian anggaran untuk program pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan gender dapat segera diimplementasikan secara lebih optimal. 2) Memperkuat jaringan seluruh tingkatan pemerintah dalam pelaksanaan GRB. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu saling berkoordinasi dengan baik agar setiap regulasi dapat saling berkesinambungan untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif secara lebih optimal. 3) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait GRB khususnya tentang efektivitas penggunaan GRB dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan dan pengembangan instrumen GRB di berbagai negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Budlender, D. (2004). *Expectations versus realities in gender-responsive budget initiatives*. Geneva: UNRISD Project on Gender and Social Policy.
- Cecelia, N. (2016). *Gender Responsive and Participatory Budgeting Imperative for Equitable Public Expenditure*. Malaysia: SpringerBriefs in Environment Security, Development, and Peace.
- Chakraborty, L. (2013). *Though this was a powerful entry point in terms Gender Responsive Budgeting in India*. India: Commonwealth.
- Dasar Keterangkuman Gender Kerajaan Negeri Pulau Pinang. (2019). *Dasar Keterangkuman Gender Kerajaan Negeri Pulau Pinang*. Penang.
- Gender Responsive and Participatory Budgeting - Penang, Malaysia" *VIII Distinction for Best Practices in Citizens' Participation*,(2014): 38-39. International Observatory on Participatory Democracy Report
- Hesselbarth, S. (2007). *Alignment Strategies in the Field of Decentralization and Local Governance*. Nepal.
- Jalaluddin Abdul Malek. (2020). SDGs, Smart Urbanism, and Politics: Stakeholder Partnerships and Environmental Cases in Malaysia. *Journal of Sustainability Science and Management, Mohd Yusof Hussain, Seng Boon Lim, Zurinah Tahir*, 9.
- Kamarudin, S. (2016). Gender Responsive and Participatory Budgeting in Penang: The People-Oriented Model. In C. Ng, *Gender Responsive and Participatory Budgeting Imperatives for Equitable Public Expenditure* (pp. 55-79). Malaysia: Springer.
- Katie McNamara, c. H.-C. (2018). Best Practices for Integrating Gender Equity and Social Inclusion (GESI) Strategies within Nepal's Agricultural Extension System. *Feed the Future*, 3.
- Nawawi, Ismail. 2012. Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya.

- Ronolo, H. S. (2016). Malaybalay City Integrated Survey System: A Tool for Gender Responsive Budgeting in Local Governance. , *Gender Responsive and Participatory Budgeting, SpringerBriefs in Environment, Security, Development and Peace* 22.
- Rudra, S. (2018). *Gender-Responsive Budgeting: A task ahead for India's 15th finance commission*. ORF Occasional Paper: India.
- Sen, G. (2000). Gender Mainstreaming in Finance Ministries. *World Development*, Vol. 28, No. 7.
- Sundari, Eva K dkk.(2006). *Modul Pelatihan Advokasi Pengangaran Berbasis Kinerja Responsif Gender*, PATTIRO: Jakarta.
- United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) . (2018). *Gender Responsive Budgeting in Asia and the Pacific*. Thailand: United Nation.